

## MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR

Hoffah Indah S<sup>1)</sup>, Nurhidayah<sup>2)</sup>, Siti Nur Farida<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>PGMI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Jember

<sup>2)</sup>PGMI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Jember

<sup>3)</sup>PGMI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Jember

\*e-mail correspondence: [hofifahsafitri3@gmail.com](mailto:hofifahsafitri3@gmail.com), [nurnurhidayah784@gmail.com](mailto:nurnurhidayah784@gmail.com),  
[sitinurfarida2003@gmail.com](mailto:sitinurfarida2003@gmail.com)\*

<https://doi.org/10.62097/au.v6i01>

Received: 01-09-2024

Revised: 25-09-2024

Accepted: 31-09-2024

---

### Info Artikel

### Abstract

#### KEYWORDS:

Elementary school,  
curriculum development

Basic education is the initial level of the national education system which aims to develop attitudes, abilities, and provide basic knowledge and skills needed to live in society and prepare students to continue to secondary level education. Basic education covers nine years, namely six years in elementary school and three years in junior high school. This article will discuss various aspects related to curriculum development policy in Indonesia, including the basics and principles of curriculum development, curriculum structure, and the curriculum design process.

#### KATA KUNCI:

Sekolah dasar,  
pengembangan kurikulum

#### Abstrak.

Pendidikan dasar adalah jenjang awal dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan sikap, kemampuan, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di masyarakat serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar mencakup sembilan tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Tulisan ini akan membahas berbagai aspek terkait kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia, termasuk dasar-dasar dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, struktur kurikulum, serta proses desain kurikulum.

Corresponding Author :

---

### INTRODUCTION (Pendahuluan)

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pengelolaan teknis operasional pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pendidikan dasar yang dikelola oleh Departemen Agama (MI dan MTs). Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar pendidikan dasar, yang meliputi: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Penetapan standar-standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar-standar tersebut juga berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian standar tersebut, dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sebuah badan mandiri independen yang secara struktural bertanggung jawab kepada Mendiknas.

Di tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD, serta Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTs dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Departemen Agama. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (untuk TK/PAUD, SD/Paket A, SMP/Paket B) dan Kantor Departemen Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Badan Pembinaan Madrasah (untuk RA, MI, dan MTs).

## **RESEARCH METHODS (Metode Penelitian)**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur. Metode studi literatur melibatkan serangkaian langkah seperti membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Penelitian ini akan mengumpulkan data yang tidak hanya berupa kata-kata dan gambar, tetapi juga melibatkan proses reduksi, penyajian, verifikasi, dan penegasan kesimpulan.

## **RESULTS AND DISCUSSION (Hasil Dan Pembahasan)**

### **A. Pengertian Manajemen Kurikulum**

Manajemen adalah proses kolaborasi antara individu, kelompok, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi, yang dikenal sebagai aktivitas manajerial (Harsey, 1988: 4). Kurikulum adalah serangkaian rencana dan pengaturan terkait tujuan, isi, bahan pelajaran, serta sumber yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2009: 3). Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam praktiknya, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) diterapkan. Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan untuk mengelola kurikulum secara mandiri dengan fokus pada kebutuhan dan pencapaian visi serta misi lembaga pendidikan tetap harus memperhatikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan (Rusman, 2009: 3).

#### **1. Ruang lingkup manajemen kurikulum**

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, dan merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) serta manajemen berbasis sekolah (MBS). Di tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum fokus pada penyesuaian dan relevansi antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah, sehingga kurikulum tersebut selaras dengan peserta didik dan lingkungan sekolah (Rusman, 2009: 4).

#### **2. Prinsip Manajemen Kurikulum**

Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu:

- a. Produktivitas, dan hasil yang dicapai dalam kegiatan kurikulum adalah aspek penting dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan utama adalah bagaimana

agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum, yang harus menjadi fokus utama dalam manajemen kurikulum

- b. Demokratisasi dalam manajemen kurikulum memerlukan pelaksanaan yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana pengelola, pelaksana, dan peserta didik berada pada posisi yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab demi mencapai tujuan kurikulum.
  - c. Kooperatif dalam manajemen kurikulum memerlukan kerja sama yang positif dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai hasil yang diharapkan.
  - d. Efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kurikulum memerlukan pertimbangan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mencapai tujuan kurikulum dengan hasil yang berguna menggunakan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Selain itu, proses manajemen kurikulum.
  - e. mengarahkan dan memperkuat visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut juga harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan departemen pendidikan nasional, seperti USPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijakan manajemen berbasis sekolah, penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), serta keputusan dan peraturan pemerintah terkait lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah. Dalam proses pendidikan, manajemen kurikulum perlu diterapkan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, dan komponen kurikulum (Rusman, 2009).
3. Fungsi Manajemen Kurikulum
- a. Pengelolaan yang terencana dan efektif dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya kurikulum dan pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum.
  - b. Meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan bagi siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Siswa dapat mencapai tingkat prestasi terbaik mereka tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang direncanakan dengan hati-hati untuk mencapai tujuan kurikulum.
  - c. Kurikulum yang dikelola dengan baik dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan dan lingkungan sekitar peserta didik. Hal ini juga dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sekitar peserta
  - d. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat mendorong kinerja guru dan aktivitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
  - e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan , proses pembelajaran selalu memastikan bahwa desain dan implementasi sesuai . Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dan implementasi dapat dihindari. Kondisi positif yang tercipta melalui kegiatan pengelolaan kurikulum membuat guru dan siswa selalu bersemangat untuk melakukan pembelajaran dengan baik.
  - f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional harus melibatkan masyarakat, terutama dalam menyediakan bahan ajar atau sumber belajar (Rusman, 2009: 5).

## **B. Perkembangan Pengelolaan Kurikulum SD Di Indonesia**

Kontekstus historis dari perubahan kurikulum dasar dapat membantu memahami perubahan tersebut. Pembaharuan atau inovasi kurikulum berarti cara baru dan inovatif untuk memilih, mengatur, dan menggunakan sumber manusia dan material yang diharapkan akan meningkatkan hasil yang terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Nasution (1982: 156) menyatakan bahwa kurikulum pengembangan pada dasarnya sangat sulit karena banyak faktor yang berkontribusi. Tiap-tiap kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu :

- a) Asas filosofis yang Pada hakekatnya menentukan tujuan umum pendidikan
- b) Asas Sosiologis yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan IPTEK.
- c) Asas Organisatoris yang memberikan dasar-dasar, dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun, dan bagaimana luas dan urutannya.
- d) Asas Psikologis yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek.

Program pendidikan terdiri dari pengembangan kurikulum. Menciptakan buku pelajaran bukanlah satu-satunya tujuan; lebih banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Banyak faktor yang berkontribusi pada perkembangan kurikulum. Ini termasuk mempertimbangkan masalah kurikulum, siapa yang terlibat, bagaimana proses, tujuan, dan kepada kurikulum yang ditujukan. Faktor-faktor ini dipertimbangkan saat memutuskan untuk menyempurnakan atau mengubah sinkronisasi dari waktu ke waktu. Kurikulum sekolah dasar di Indonesia telah mengalami banyak transformasi. Daftar perubahan kurikulum dasar sejak kemerdekaan dapat digambarkan sebagai berikut .

1. Kurikulum awal kemerdekaan

yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro pada awal kemerdekaan tahun 1945 melakukan perubahan besar pada sistem pendidikan dan pengajaran. Pada tahap pertama, garis besar pendidikan dan pengajaran harus dibuat berdasarkan falsafah kebangsaan Indonesia. Kurikulum ini menekankan pentingnya menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam pendidikan (Saiful Anam, 2006: 123). Pada awal kemerdekaan, ideologi pendidikan dan kurikulum juga diubah. Sangat singkat dan tidak melibatkan data empiris.

2. Kurikulum tahun 1947 (Rencana Pelajaran 1947):

Semuanya harus diselesaikan dengan cepat karena sumber daya sangat terbatas selama revolusi. Hal ini juga berlaku untuk upaya membangun sistem pendidikan dan pendidikan nasional untuk menggantikan sistem kolonial. Ini termasuk dalam upaya membuat Rencana Pelajaran 1947. Namun karena keadaan republik yang tidak stabil dan kondisi yang tidak memadai, Rencana Pelajaran 1947 baru dapat diterapkan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Oleh karena itu, banyak orang yang menyebut kurikulum nasional dimulai dari kurikulum tahun 1950. Rencana Pelajaran 1947 menjadi lebih rinci tentang mata pelajarannya ketika ia berkembang. Pada tahun 1952, inilah yang disebut Rencan Pelajaran Terurai.

3. Kurikulum Tahun 1964 (Rencana Pendidikan)

Kurikulum tahun 1964 dibuat dengan fokus pada pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan Pancawardhana. Disebutkan lima bidang studi: kecerdasan, perkembangan moral, keterampilan, emosional/artistik, dan fisik. Saiful Anam (2006) menyatakan Kondisi di mana upaya untuk membaharui

pendidikan dan pengajaran, terutama kurikulum dan metode mengajar, sudah mulai dilembagakan secara terstruktur dipengaruhi oleh proses penyusunan Rencana Pendidikan 1964.

4. Kurikulum Tahun 1968 :

Kurikulum tahun 1968 dibuat untuk menyesuaikan dengan Rencana Pendidikan 1964. Dengan kata lain, sebagaimana ditetapkan dalam berbagai keputusan MPRS tahun 1966, kurikulum itu harus mencerminkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Kurikulum sekolah dasar 1968 masih mempertahankan dua struktur program: satu untuk sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa daerah sampai dengan kelas III dan satu lagi untuk sekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Indonesia mulai dari kelas I

5. Kurikulum Tahun 1975:

Pendekatan kurikulum tahun 1975 memberikan penekanan khusus pada tujuan menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien . Karena pengaruh konsep manajemen, atau MBO (manajemen berdasarkan tujuan), kurikulum sekolah dasar tahun 1975 terdiri dari tujuh unsur utama: (a) Dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip; (b) Struktur Kurikulum Program ; (c) Garis Besar Program Pengajaran; (d) Sistem Penyajian; (e) Sistem penilaian; (f) Sistem Bimbingan dan Penyuluhan; dan (g) Pedoman Pengawasan dan Administrasi. Saiful Anam (2006), hlm. 129-139 .

6. Kurikulum Tahun 1984:

Gagasan bahwa kurikulum harus diperbaiki terus berkembang. Para ahli kurikulum menekankan bahwa penekanan hanya pada tujuan dan materi tidak cukup untuk menghasilkan lulusan yang luar biasa. Oleh karena itu, kurikulum 1984 dibuat dengan pendekatan keterampilan proses dan tidak mengubah semua yang ada di kurikulum 1975. Meskipun mengutamakan pendekatan keterampilan proses, komponen tujuan tetap dianggap penting. Kurikulum 1984, yang sebelumnya dikenal sebagai kurikulum 1975, telah diperbarui dengan konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

7. Kurikulum 1994:

Polemik mengenai CBSA tidak ada di dalam kurikulum. Kurikulum 1994 lebih mirip dengan kurikulum tahun 1975 dan 1984, atau perpaduan antara pendekatan tujuan dan pendekatan proses.

8. Program Pendidikan Tahun 1999 ( Program Tambahan 1994)

Suplemen Kurikulum 1994 ini antara lain disebabkan oleh Reformasi 1998, perubahan politik besar di Indonesia. Selama masa reformasi, dunia pendidikan mengalami banyak perubahan signifikan. Salah satunya adalah upaya untuk melatih siswa berpikir kritis, kemampuan penglihatan dan analisis, serta keterampilan lain yang tidak berkembang selama era orde baru. Suplemen Kurikulum 1994 yang dibuat pada tahun 1999 memasukkan perubahan-perubahan ini. (Saiful Anam, 2006: 129-139)

9. Kurikulum 2004:

Suasana reformasi dan perubahan iklim global yang cepat mendorong pendidikan nasional untuk menyesuaikan diri. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melengkapi undang-undang tentang sistem pendidikan. Kurikulum 2004, atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dibuat oleh undang-undang ini. Pemerintah percaya bahwa penelitian dan penyempurnaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan setelah Kurikulum 1994 diterapkan selama beberapa tahun. Akibatnya, sejak tahun 2001, Departemen Pendidikan telah

melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kurikulum yang dibuat pada tahun 1994 dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Menurut Mulvasa (2006),

#### 10. Kurikulum KTSP

Rancangan kurikulum yang dibuat oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 2004, yang akan diterapkan sebagai uji coba di sekolah pada tahun akademik 2004-2005.

Namun karena UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, rancangan kurikulum tersebut harus disesuaikan kembali. Selanjutnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) mengembangkan standar isi dan kompetensi untuk lulusan, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005. Panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan oleh BNSP memungkinkan setiap satuan pendidikan, termasuk sekolah dasar, untuk mengembangkan kurikulum yang dapat diterapkan di satuan pendidikan mereka. Sekolah-sekolah yang belum siap mengembangkan kurikulum dapat menggunakan model yang dikembangkan oleh BNSP, dan pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kurikulum yang dibuat oleh BNSP.

#### 11. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah upaya untuk merevisi kurikulum pendidikan di Indonesia dengan tujuan memberikan sekolah lebih banyak kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan dan karakteristik siswa lokal. Kurikulum ini menekankan literasi, numerasi, dan literasi digital serta mendorong kreativitas, keterampilan, dan karakter siswa secara keseluruhan.

### C. Karakteristik Kurikulum SD/MI

#### a) Kerangka Dasar Kurikulum

##### 1. Kelompok Mata Pelajaran

Kerangka dasar kurikulum mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 6 Ayat (1), yang menyatakan bahwa kurikulum untuk pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diatur berdasarkan kelompok mata pelajaran berikut:

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Kelompok mata pelajaran estetika.
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

##### 2. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kurikulum harus disesuaikan dengan potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik agar mereka dapat menguasai kompetensi yang bermanfaat bagi diri mereka. Dalam hal ini, peserta didik harus menerima pelayanan pendidikan yang berkualitas serta memiliki

kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas, dinamis, dan menyenangkan.

- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar yaitu :
  - 1) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Belajar untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan serta berbuat secara efektif.
  - 3) Belajar untuk hidup bersama dan memberikan manfaat bagi orang lain.
  - 4) Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan.
  - 5) Pelaksanaan kurikulum harus memberikan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik, sambil memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi yang mencakup dimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
  - 6) Kurikulum dijalankan dalam suasana hubungan yang saling menerima dan menghargai antara peserta didik dan pendidik, dengan prinsip tut wuri handayani, ing mada mangun karsa, ing ngarsa sing tuladha (di belakang memberikan dorongan, di tengah membangun semangat, di depan memberi contoh).
  - 7) Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan multistrategi dan multimedia, memanfaatkan sumber belajar dan teknologi yang memadai, serta lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (memanfaatkan segala yang terjadi, berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta alam semesta sebagai sumber belajar, contoh, dan teladan).
  - 8) Kurikulum harus memanfaatkan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan, dengan mengoptimalkan muatan seluruh bahan kajian. Kurikulum mencakup kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri, diselenggarakan dengan keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang sesuai antara kelas, jenis, dan jenjang pendidikan.

### 3. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi ini terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- a. Kurikulum SD/MI mencakup 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri sesuai yang tertera pada tabel 2. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi berdasarkan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan lokal, yang

- tidak dapat digolongkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- b. Pengembangan diri bukanlah mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sebagai gantinya, pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat mereka, serta kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan dalam bentuk ekstrakurikuler. Ini melibatkan pelayanan konseling terkait masalah pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.
  - c. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS di SD/MI disajikan dalam bentuk "IPA Terpadu" dan "IPS Terpadu".
  - d. Pembelajaran di kelas I hingga III menggunakan pendekatan tematik, sementara di kelas IV hingga VI diterapkan pendekatan mata pelajaran.
  - e. Alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran ditetapkan sesuai dengan struktur kurikulum.
  - f. Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran (dua semester) adalah antara 34 dan 38 minggu.

## **CONCLUSION (KESIMPULAN)**

Manajemen adalah proses kerja sama antara individu, kelompok, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi sebagai bagian dari aktivitas manajerial. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) diterapkan.

Pengembangan kurikulum adalah komponen penting dalam program pendidikan, bertujuan tidak hanya untuk memproduksi bahan pelajaran tetapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan kurikulum melibatkan banyak faktor, termasuk isu-isu tentang kurikulum, proses, tujuan, dan penerima kurikulum tersebut. Kurikulum sekolah dasar di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak era kemerdekaan. Kurikulum SD/MI yang dibentuk berdasarkan Kebijakan Pendidikan Nasional tahun 2005 berfokus pada peran dan tanggung jawab guru dalam sistem pendidikan yang menyeluruh, mencakup aspek akademik, disiplin, interdisipliner, teknologi, estetika, dan humanistik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan karakter siswa, mendorong pengalaman belajar yang efektif, dan mempromosikan lingkungan belajar yang kolaboratif.

## **REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)**

- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kristiawan, Muhammad dkk. 2017. *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Kristiawan, Muhammad, Manajemen pendidikan (Yogyakarta:Deepublish,2017)
- Rusman, *Mengemukaan prinsip-prinsip KTSP* (Yogyakarta:Deepublish,2011),hlm. 77 Rusman, Manajemen kurikulum (Yogjakarta: Deepublish,2011), hlm. 77
- Lestari, Rena. *Siklus manajemen* (Yogyakarya:Deepublis,2006), hlm.78



- Triwiyanto, Teguh (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pengembangan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Fajartriani, Tia dan Sulfemi, Wahyu Bagja. (2014). *Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kecamatan Cigudeg*. *Edutecno*. 8 (1), 17-26.
- Rusman (2009). *Manajemen Kurikulum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Hamalik, Oemar (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Kwartolo, Yuli. *Catatan Kritis Tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi*. *Jurnal Pendidikan Panabur*, 01 Maret 2002.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *pengembangan kurikulum: teori dan praktek* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005..